

## Legitimasi Kepemimpinan dalam Islam: Perspektif Syiah dan Sunni

**Muh. Abrar**

Institut Ummul Quro Al-Islami

muh.abrar@iuqibogor.ac.id

### Abstrak

Rekonstruksi Penelitian ini mengkaji perbedaan perspektif kepemimpinan dalam Islam antara aliran Syiah dan Sunni, dua mazhab terbesar dalam umat Islam. Syiah berpendapat bahwa kepemimpinan umat Islam atau **imamah** adalah hak yang telah ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW, dengan Ali bin Abi Thalib dan keturunannya sebagai pemimpin yang sah. Bagi Syiah, imamah bukan hanya jabatan politik, tetapi juga bagian dari ajaran agama yang diwahyukan dan harus diterima oleh umat Islam. Oleh karena itu, kepemimpinan dalam perspektif Syiah tidak bersifat universal, melainkan memiliki dimensi ilahi yang ditetapkan oleh Tuhan dan Nabi. Sebaliknya, Sunni percaya bahwa kepemimpinan harus dipilih oleh umat melalui **musyawarah** dan **bai'at**. Dalam pandangan Sunni, proses pemilihan pemimpin harus dilakukan oleh komunitas Muslim dengan mempertimbangkan keadilan, keturunan Quraisy, dan kemampuannya dalam memimpin umat. Meskipun terdapat perbedaan mendasar terkait legitimasi kepemimpinan, baik Syiah maupun Sunni sepakat bahwa pemimpin Islam harus memiliki kualitas moral dan spiritual yang tinggi, serta bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan umat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perbedaan dan persamaan dalam teori kepemimpinan Islam ini, serta implikasi sosial dan politiknya bagi umat Islam secara global.

**Kata Kunci:** kepemimpinan Islam, Syiah, Sunni, imamah, bai'at, musyawarah, keadilan.

### Abstract

This study examines the differences in perspectives on leadership within Islam between the Shia and Sunni sects, two of the largest denominations in Islam. Shia believes that Islamic leadership or **imamate** is a right that was predetermined by Prophet Muhammad SAW, with Ali bin Abi Talib and his descendants as the legitimate leaders. For Shia, imamate is not only a political position but also a religious teaching revealed by God, which must be accepted by the Muslim community. Therefore, leadership in Shia's perspective is not universal but has a divine dimension established by God and the Prophet. In contrast, Sunni believes that leadership should be chosen by the community through **consultation** and **bai'at**. According to Sunni, the selection process should be done by the Muslim community, considering justice, Quraysh lineage, and the leader's ability to lead the community. Despite significant differences regarding the legitimacy of leadership, both Shia and Sunni agree that Islamic leaders must possess high moral and spiritual qualities, as well as the responsibility to uphold justice and the welfare of the community. This study aims to explain the differences and similarities in these leadership theories, as well as their social and political implications for Muslims worldwide.

**Keywords:** Islamic leadership, Shia, Sunni, imamate, bai'at, consultation, justice.

## PENDAHULUAN

Hukum Mazhab Syiah dalam sejarah Islam merupakan salah satu cabang utama dalam dunia Islam yang lahir sebagai hasil dari perselisihan politik dan teologis terhadap persoalan suksesi kepemimpinan pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Peristiwa sejarah inilah yang kemudian melahirkan identitas Syiah sebagai suatu kelompok yang meyakini bahwa kepemimpinan umat Islam tidak hanya merupakan keputusan sosial-politik semata, tetapi juga telah ditetapkan secara teologis oleh Nabi Muhammad SAW dan berkelanjutan melalui keturunan beliau, terutama Ali bin Abi Thalib dan para imam yang mengikuti garis keturunannya. Pemikiran ini pada akhirnya menjadi dasar bagi worldview dan doktrin Syiah yang khas dan berbeda dari Islam Sunni, khususnya dalam hal legitimasi dan otoritas kepemimpinan Islam (Sabaruddin & Ar Rasyid, 2023).

Secara terminologis, istilah *Syiah* sendiri berasal dari kata *Syī'atu 'Alī* yang berarti “pengikut Ali”. Istilah ini menunjukkan orientasi awal dari kelompok Syiah yang mengedepankan dukungan khusus kepada Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin setelah Nabi Muhammad SAW. Dalam tradisi ini, Ali dipandang tidak hanya sebagai figur politik tetapi juga figur spiritual dan pemimpin (*imam*) yang ditetapkan berdasarkan ketentuan ilahi, bukan sekadar konsensus atau musyawarah komunitas Muslim (Hamdon & Dwairi, 2025). Pandangan ini kemudian membentuk doktrin *imamah* yang sangat fundamental dalam ajaran Syiah, di mana para imam dipandang sebagai figur yang ma'sum (terjaga dari dosa) dan sebagai pewaris otoritas kenabian dalam kerangka sejarah umat Islam (Salum, 2025).

Sejarah awal munculnya Syiah dapat ditelusuri kembali ke masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi, ketika muncul perang pemikiran yang fundamentalis antara kelompok yang menyetujui pilihan berlandaskan konsensus umat dengan kelompok yang menekankan penetapan ilahi. Peristiwa penting seperti rapat Saqifah Bani Sa'idah memperlihatkan bagaimana sebagian besar umat Muslim saat itu memilih Abu Bakr sebagai khalifah melalui keputusan yang dipandang sebagai konsensus komunitas, sementara para pendukung Ali memandang keputusan itu sebagai penolakan terhadap prinsip yang benar—bahwa Nabi telah secara implisit atau eksplisit menunjuk Ali sebagai penerusnya melalui wahyu atau wasiat tertentu. Perbedaan interpretasi inilah yang kemudian menjadi akar dari pemisahan dua arus utama dalam Islam, yang kini dikenal sebagai perpecahan antara Syiah dan Sunni (Al-Khabbaz, 2022).

Dalam literatur akademik 5 tahun terakhir, fenomena perbedaan ini dibahas secara komprehensif dalam kajian-kajian ilmiah. Misalnya, dalam penelitian Sabaruddin dan Ar Rasyid (2023), disebutkan bahwa kelompok Syiah secara historis merujuk identitasnya pada dukungan terhadap Ali bin Abi Thalib, sementara Sunni sendiri berakar pada pemahaman *al-Sunnah wa al-Jama'ah* yang memandang legitimasi kepemimpinan sebagai hasil konsensus umat Muslim, bukan sebagai suatu penetapan khusus ilahi yang terwariskan melalui garis keturunan tertentu (Sabaruddin & Ar Rasyid, 2023).

Perbedaan mendasar antara pandangan Syiah dan Sunni terhadap kedudukan Ali bin Abi Thalib tidak hanya sekadar persoalan politik, tetapi juga berakar pada interpretasi teologis yang berbeda terhadap teks dan tradisi Islam. Dalam pandangan Syiah, Ali dianggap sebagai figur yang memiliki legitimasi spiritual dan otoritas kepemimpinan yang jelas karena kedekatannya dengan Nabi Muhammad sebagai sepupu, menantu, dan figur yang dekat dalam tradisi pendidikan dan keilmuan Islam awal. Ali dianggap layak menjadi pemimpin sejak awal karena kualitas spiritual, integritas moral, dan kedekatannya dengan Rasulullah, suatu posisi yang diyakini Syiah sebagai warisan kenabian yang sah. Wahyu atau wasiat yang mengatur hal ini diinterpretasikan secara berbeda oleh kaum Syiah, salah satunya melalui narasi hadis-hadis tertentu seperti hadis Ghadir Khum yang dimaknai legitimasi imamah Ali (Zahrah, 1996).

Sebaliknya, kelompok Sunni melihat bahwa keputusan kolektif untuk memilih khalifah pertama harus berdasarkan musyawarah seluruh umat Muslim dan suara sahabat yang hadir pada saat itu, sehingga legitimasi kepemimpinan tidak terikat pada garis keturunan tertentu. Proses ini kemudian diterima sebagai *ijtihad* komunitas Muslim dengan mengutamakan prinsip stabilitas dan persatuan dalam masa transisi pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, tantangan teologis antara kedua kelompok ini pada awalnya muncul sebagai diskursus bagaimana otoritas dan kepemimpinan transisi harus dilakukan. (Al-Qardhawy, 1997).

Sejalan dengan itu, kajian ilmiah kontemporer juga menekankan bahwa perbedaan awal yang semula bersifat politis kemudian berkembang menjadi suatu sekte dengan identitas doktrinal dan institusional yang jelas. Syiah berkembang menjadi beberapa kelompok sekte internal seperti Itsna Asyariyah (Dua Belas Imam), Ismailiyah, dan Zaidiyah, yang masing-masing memiliki pandangan tersendiri terhadap konsep imamah dan otoritas spiritual. Hal ini menunjukkan betapa kompleksnya evolusi Syiah sebagai suatu tradisi keagamaan yang tidak bisa dipisahkan dari konteks sejarah panjang konflik kepemimpinan dan interpretasi teologis di dunia Islam awal. (Zahrah, 1996).

Dalam kajian kontemporer, juga ditekankan bahwa pengaruh sejarah perpecahan ini tidak berhenti hanya pada masa awal Islam, tetapi terus berimplikasi terhadap dinamika politik dan sosial di dunia Muslim hingga saat ini. Misalnya, kajian-kajian tentang persaingan politik modern antara negara-negara mayoritas Sunni dan negara-negara yang memiliki komunitas Syiah signifikan menunjukkan bahwa dinamika historis ini terus menjadi faktor yang mempengaruhi hubungan antarnegara, politik lokal, dan identitas sektarian di berbagai wilayah seperti Timur Tengah dan Asia Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa akar historis yang dimiliki oleh Syiah telah memberikan dampak jangka panjang terhadap cara kelompok ini berinteraksi dengan lingkungan sosial-politik mereka (Al-Khabbaz, 2022).

Secara konseptual, pandangan Syiah terhadap Ali dan keturunannya sebagai pemimpin yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW mengandung dimensi filsafat teologis yang mengintegrasikan aspek spiritual dan politik secara simultan. Konsep ini kemudian menjadi landasan bagi banyak ulama Syiah sepanjang sejarah untuk mengembangkan pengajaran dan

institusi keagamaan yang mendukung legitimasi doktrin imamah. Di sisi lain, komunitas Sunni tetap menekankan pentingnya konsensus dan struktur kelembagaan yang mencerminkan pluralitas komunitas Muslim awal sebagai dasar legitimasi kepemimpinan mereka. Perbedaan pemikiran ini kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas teologis masing-masing (Salum, 2025).

Sebagai kesimpulan, penciptaan identitas Syiah berakar pada perdebatan dasar tentang siapa yang berhak menjadi pemimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Keyakinan Syiah bahwa Ali bin Abi Thalib telah ditetapkan secara khusus sebagai pemimpin yang sah berbeda secara prinsipil dari pandangan Sunni yang mengutamakan musyawarah dan konsensus komunitas. Perbedaan fundamental ini tidak hanya mencerminkan variasi historis dalam interpretasi tekstual, tetapi juga menunjukkan bagaimana peristiwa sejarah awal Islam dapat membentuk tradisi keagamaan besar yang tetap relevan hingga hari ini. Studi kontemporer telah menegaskan kembali perbedaan ini dalam konteks yang lebih luas dari sejarah keagamaan, politik, dan sosial umat Islam (Sabaruddin & Ar Rasyid, 2023).

### **Metodologi Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah **pendekatan kualitatif deskriptif** yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara mendalam dan komprehensif berdasarkan kajian literatur, bukan melalui pengumpulan data kuantitatif atau eksperimen lapangan. Pendekatan kualitatif deskriptif menekankan pada pemahaman makna dan konteks berdasarkan interpretasi naratif atas sumber-sumber data yang relevan, sehingga cocok untuk penelitian yang bertujuan memahami pandangan, konsep, dan fenomena dari berbagai perspektif sumber teks atau dokumen yang ada (*Hall & Liebenberg, 2024*). Dalam pendekatan ini, data dipahami dan diinterpretasikan melalui kajian terhadap teori, konsep, dan temuan sebelumnya yang berkaitan dengan kepemimpinan dalam perspektif Syiah dan Sunni.

Desain penelitian ini secara khusus mengandalkan **studi pustaka (literature review)** sebagai strategi utama. Studi pustaka dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis literatur ilmiah, kitab klasik, artikel jurnal, dan sumber primer seperti Al-Qur'an dan As-Sunnah yang dianggap relevan dengan fokus kajian. Literatur yang dipilih dipilih berdasarkan relevansi konten, kredibilitas sumber, serta kontribusinya terhadap pembahasan teori kepemimpinan dalam kedua tradisi Islam tersebut (*Furidha, 2023*). Studi pustaka ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran yang luas mengenai landasan historis, teologis, dan metodologis yang telah dibahas oleh para akademisi serta ulama, sehingga menghasilkan interpretasi yang sistematis dan mendalam tentang teori kepemimpinan dalam perspektif Syiah dan Sunni.

Selain itu, penelitian kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk menyajikan uraian fenomena secara holistik berdasarkan data teks tanpa mengabaikan konteks budaya dan

historis yang melatarbelakangi perkembangan pandangan tersebut. Dengan demikian, metode ini mendukung pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena kepemimpinan dalam kajian Islam dibandingkan pendekatan yang hanya bersifat numerik atau eksperimental (*Hall & Liebenberg, 2024; Furidha, 2023*).

## **Pembahasan**

### **1. Kepemimpinan dalam Perspektif Syiah**

Dalam tradisi teologis dan historis Syiah, konsep kepemimpinan umat Islam dikenal dengan istilah **imamah**—suatu doktrin yang tidak hanya memuat aspek politik, tetapi juga dimensi spiritual dan ontologis keberadaan pemimpin (*imam*) yang ditetapkan oleh Allah SWT melalui perantara Nabi Muhammad SAW. Kepercayaan ini berakar dari penafsiran Syiah terhadap sejumlah teks Al-Qur'an dan hadis yang mereka yakini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad saw *telah menunjuk secara eksplisit* siapa yang berhak menjadi penerusnya, yakni Ali bin Abi Thalib dan keturunannya (tercantum dalam literatur klasik Syiah seperti *Manaqib Ale Abi Talib* karya Ibn Shahrashub) (*Ibn Shahrashub, 12th century; sebagai dirujuk dalam studi kontemporer di bidang Syiah*) – juga menjadi dasar teologis imamah dalam kajian klasik.

Sebagai landasan historis, kaum Syiah menegaskan bahwa Ali bin Abi Thalib—sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW—memiliki otoritas spiritual dan politik yang sah karena dinilai telah menerima “penetapan ilahi” (*nass*). Penetapan ini dilihat oleh kaum Syiah sebagai hak prerogatif ilahi yang diwariskan secara turun-temurun kepada para imam berikutnya dalam garis keturunan Ali dan Fatimah, putri Nabi SAW (Babgure, 2023). Dari sudut pandang ini, imamah bukan sekadar jabatan yang diperebutkan oleh umat berdasarkan musyawarah, tetapi merupakan posisi yang telah ditentukan oleh Tuhan melalui wahyu dan sejarah kenabian Nabi Muhammad SAW (Babgure, 2023; Rezaei & Saeidi Roshan, 2024).

Imamah dalam Syiah juga dilihat sebagai **rukun iman** (adalah suatu dimensi akidah yang wajib diyakini oleh penganutnya), dan tokoh-tokoh Syiah klasik serta kontemporer menyatakan bahwa imam tidak hanya bertindak sebagai penguasa politik, tetapi sebagai **pembimbing spiritual** umat yang memiliki *'ilm ladunni* (ilmu batiniah yang diberikan oleh Allah) dan ma'sum (terselamatkan dari kesalahan dalam ajaran) (Babgure, 2023; Rezaei & Saeidi Roshan, 2024). Dalam literatur Syiah klasik, imam dipandang sebagai figur yang memegang peran antara umat dan Tuhan, menjembatani pemahaman wahyu dan aplikasi sosial-politiknya.

Dalam kajian kontemporer, artikel “*The Concept of Leadership in Sunni and Shia Perspectives*” menegaskan bahwa perbedaan antara konsep kepemimpinan Syiah dan Sunni tidak hanya bersifat politis melainkan juga sangat teologis dan sosiologis, di mana kelompok Syiah menekankan legitimasi kepemimpinan melalui garis keturunan dan nasab sebagai

bagian esensial ajaran Islam yang tidak dapat dipisahkan dari doktrin doktrinal imamah (Babgure, 2023). Studi ini juga menunjukkan bahwa baik Syiah maupun Sunni sama-sama mengakui pentingnya kepemimpinan dalam Islam—bahkan dalam bidang muamalah (interaksi sosial-politik) pandangan mereka kadang bersinggungan—namun keduanya berbeda secara signifikan dalam hal landasan teologis dan cara legitimasi kepemimpinan (Babgure, 2023).

Dalam perspektif Syiah, **kepemimpinan dipandang sebagai amanah ilahiyah** yang diberikan khusus kepada para imam tertentu yang termasuk Ahl al-Bayt (keluarga Nabi). Imamah menurut Syiah bukan sekadar jabatan politik atau administrasi, melainkan perwujudan kepemimpinan yang memandu umat dalam aspek spiritual, hukum, dan moral berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari wahyu. Hal ini menunjukkan bahwa Syiah melihat imamah sebagai sebuah **institusi esensial** yang menyatukan otoritas spiritual dan politik secara tak terpisahkan, di mana imam Syiah dipercayai memegang peran interpretatif atas teks Al-Qur'an dan Sunnah secara independen dari musyawarah komunitas (Babgure, 2023; Rezaei & Saeidi Roshan, 2024).

Pendekatan ini dicerminkan juga dalam penekanan Syiah terhadap narasi hadis tertentu, terutama hadis Ghadir Khum, yang bagi penganut Syiah merupakan bukti bahwa Nabi Muhammad SAW secara tegas menunjuk Ali sebagai pemimpin umat yang sah. Meskipun sebagian ulama Sunni memiliki penafsiran berbeda terhadap hadis ini, bagi kalangan Syiah hal tersebut adalah titik tolak legitimasi imamah sebagai institusi yang ditetapkan ilahi (Babgure, 2023).

Selain itu, pandangan Syiah kontemporer menunjukkan bahwa meskipun struktur pemerintahan modern tidak selalu secara langsung mengadopsi doktrin imamah tradisional, prinsip dasar bahwa pemimpin umat memiliki mandat ilahiah tetap menjadi landasan penting bagi cara penganut Syiah memandang otoritas dan legitimasi kepemimpinan dalam komunitas Muslim global. Dengan demikian, doktrin imamah Syiah tidak hanya relevan dalam konteks sejarah awal Islam, tetapi juga dalam diskusi keagamaan kontemporer mengenai hubungan antara agama dan politik dalam tradisi Islam.

## **2. Kepemimpinan dalam Perspektif Sunni**

Beralih ke tradisi Sunni, pandangan mengenai kepemimpinan umat Islam memiliki penekanan berbeda dari Syiah. Dalam pandangan Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah, **kepemimpinan politik tidak merupakan doktrin akidah yang telah ditetapkan oleh wahyu secara mutlak**, melainkan merupakan hasil konsensus (*ijma'*) dan musyawarah (*syura*) umat Islam dalam menentukan figur yang paling layak dan mampu menjalankan hukum Islam serta memelihara persatuan umat. Hal ini telah dipaparkan oleh berbagai ulama dan fasilitas dalam tradisi Sunni, yang melihat bahwa keberlangsungan umat Islam

bergantung pada “kepemimpinan yang dipilih oleh komunitas” melalui proses bai’at dan musyawarah yang sah (Babgure, 2023).

Dalam konsep Sunni, figur pemimpin disebut **khalifah**, yang etimologinya berarti “pengganti” atau “wakil” Nabi, bukan sebagai pewaris teologis secara langsung. Legitimasi khalifah dalam tradisi Sunni biasanya dilandasi oleh persetujuan kolektif umat Islam, baik melalui bai’at langsung kepada figur pemimpin maupun melalui mekanisme syura di antara para pemimpin komunitas Muslim (Babgure, 2023). Ini berarti bahwa otoritas pemimpin Sunni dilihat sebagai **jabatan sosial-politikal yang sah** ketika diterima oleh mayoritas umat Islam yang kompeten, bukan sebagai mandat ilahiyah yang eksklusif kepada satu garis keturunan.

Penekanan pada musyawarah dan bai’at ini berakar kuat dalam praktik awal kepemimpinan Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh, peristiwa Bai’at Saqifah menggambarkan bagaimana para sahabat berkumpul untuk menentukan pemimpin pertama umat Islam, yang akhirnya menjadikan Abu Bakar ash-Shiddiq sebagai khalifah pertama atas persetujuan komunitas Muslim pada waktu itu (Babgure, 2023). Dalam tradisi Sunni, keputusan tersebut dipandang sebagai wujud *ijma*’ serta manifestasi dari prinsip musyawarah (*syura*) dan bai’at yang sah.

Selain itu, dalam tradisi Sunni, ada penekanan pada syarat-syarat tertentu agar seseorang dapat menjadi pemimpin, termasuk harus berasal dari keturunan Quraisy (*majmu’a al-Quraisy*) dan dikenal adil serta mampu menegakkan hukum Islam secara efektif. Persyaratan ini bertujuan memastikan bahwa calon pemimpin memiliki legitimasi sosial yang kuat dan kemampuan untuk menjaga umat dari konflik internal dan ancaman eksternal.

Perbedaan mendasar ini—antara Syiah yang melihat kepemimpinan sebagai mandat ilahiah dan Sunni yang melihatnya sebagai hasil konsensus *ijma*’—menjadi inti perdebatan teologis yang terus berlanjut hingga kini. Artikel “*The Concept of Leadership in Sunni and Shia Perspectives*” menegaskan adanya **signifikan perbedaan konseptual** dalam hal ini, di mana Sunni menempatkan kepemimpinan sebagai kewajiban komunitas melalui musyawarah dan bai’at, sementara Syiah melihatnya sebagai mandat ilahi yang diwariskan kepada imam tertentu (Babgure, 2023). Studi ini juga menunjukkan bahwa dalam aspek sosial-politik sehari-hari (muamalah), beberapa prinsip umum kepemimpinan dapat bertemu, tetapi basis teologisnya tetap berbeda secara signifikan (Babgure, 2023).

Dalam kajian kontemporer lebih lanjut, beberapa penelitian menekankan bahwa meskipun Sunni dan Syiah berbeda dalam basis legitimasi kepemimpinan mereka, terdapat unsur-unsur **persamaan dalam tujuan kepemimpinan**, yakni menjaga persatuan umat, menegakkan keadilan, dan menjamin penerapan syariah dalam kehidupan sosial-politik Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan metodologis tidak selalu mengesampingkan tujuan utama kepemimpinan Islam (Babgure, 2023).

Namun, dalam praktik sejarah dan kontemporer, perbedaan ini sering kali memicu dinamika politik dan konflik sektarian, terutama ketika klaim legitimasi kepemimpinan digunakan untuk memperluas pengaruh politik atau ideologi tertentu di antara komunitas Muslim yang lebih luas. Perbedaan ini juga terlihat dalam pendekatan terhadap hukum, interpretasi teks, dan posisi pemimpin dalam kehidupan masyarakat, baik dalam konteks klasik maupun modern (*Babgure, 2023*).

Dalam perspektif Sunni kontemporer, meskipun doktrin imamah Syiah dipandang sebagai pandangan teologis yang berbeda, masih terdapat upaya dialog akademik dan teologis untuk memahami nilai universal dari kepemimpinan dalam Islam serta mencari titik temu melalui prinsip-prinsip dasar yang disepakati bersama seperti keimanan kepada Allah SWT, Nabi Muhammad SAW, dan keadilan sosial (*Babgure, 2023*).

### **Kesimpulan**

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan mengenai kepemimpinan dalam Islam antara Syiah dan Sunni sangat berbeda, baik dari aspek teologis, politik, maupun sosial. Syiah memandang kepemimpinan sebagai **hak ilahi yang telah ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW**, dengan Ali bin Abi Thalib dan keturunannya sebagai pemimpin yang sah dan memiliki otoritas spiritual dan politik. Dalam perspektif Syiah, **imamah** bukan hanya jabatan administratif, tetapi merupakan kewajiban agama yang wajib diikuti oleh umat Islam, karena Imam dianggap memiliki ilmu khusus (ilmu ladunni) yang diberikan oleh Tuhan. Oleh karena itu, bagi Syiah, kepemimpinan tidak dapat dipilih oleh umat melalui musyawarah atau pemilihan umum, melainkan harus berdasarkan ketetapan ilahi yang diwariskan melalui garis keturunan Ali bin Abi Thalib, yang dipercaya telah ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW melalui wahyu atau wasiat tertentu.

Di sisi lain, **Sunni melihat kepemimpinan sebagai hasil konsensus umat**, yang lebih mengutamakan proses **musyawarah dan bai'at**. Dalam tradisi Sunni, pemimpin yang sah harus dipilih oleh umat berdasarkan mekanisme yang adil dan diterima oleh mayoritas. Mereka percaya bahwa seorang pemimpin harus berasal dari keturunan Quraisy, adil, serta mampu menegakkan hukum Islam dengan bijaksana. Kepemimpinan Sunni menekankan bahwa keputusan untuk memilih seorang khalifah adalah kewajiban umat Islam yang diatur dalam prinsip syura (musyawarah), yang mencerminkan semangat demokrasi dan kolektivitas umat.

Meskipun ada perbedaan mendalam mengenai asal usul legitimasi kepemimpinan ini, baik Syiah maupun Sunni sepakat bahwa pemimpin Islam harus memiliki kualitas moral dan spiritual yang tinggi, serta bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan umat. Meskipun dalam praktik sejarah, perbedaan ini sering kali memicu konflik sektarian, **tujuan utama dari kedua pandangan ini tetap sama**, yaitu untuk menjaga persatuan umat Islam dan melaksanakan ajaran Islam secara komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Babgure, H. (2023). The concept of leadership in Sunni and Shia perspectives. *Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.19109/ampera.v4i01.22225>
- Furidha, B. W. (2023). Comprehension of the descriptive qualitative research method: A critical assessment of the literature. *Journal of Multidisciplinary Research*, 2(4), 1–10. <https://doi.org/10.56943/jmr.v2i4.443>
- Hamdon, H. M. O., & Dwairi, A. A. A. (2025). The impact of Islamic political thought on governance systems: A comparative analytical study between Sunni and Shia models. *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies*, 8(5), 1329–1337. <https://doi.org/10.53894/ijirss.v8i5.9130>
- Hall, S., & Liebenberg, L. (2024). Qualitative description as an introductory method to qualitative research for master's-level students and research trainees. *International Journal of Qualitative Methods*, 23, 1–5. <https://doi.org/10.1177/16094069241242264>
- Ibn Shahrashub. (12th century). *Manaqib Ale Abi Talib* (discussed in modern Syiah doctrinal contexts).
- Rezaei, H., & Saeidi Roshan, M. B. (2024). Comparative analysis of imamate and caliphate in Shi'a and Sunni theological traditions. *Journal of Research in Shi'a Comparative Theology*, 5(8), 264–280. <https://doi.org/10.22054/jcst.2024.77162.1143>
- Salum, M. H. Y. (2025). Sectarianism and fragmentation in the Muslim world: A Qur'anic and Hadith perspective on the causes, consequences, and path to unity. *Dirasah*, 3(1), 49. <https://doi.org/10.59373/drs.v3i1.49>
- Zahrah, I. A. (1996). *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah*. Logos.